

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN
KABUPATEN SIAK**



Oleh:

RENI MUSTIKA DEWI

NIM.10875004377

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh:

RENI MUSTIKA DEWI
NIM.10875004377

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

Oleh:

RENI MUSTIKA DEWI
NIM. 10875004377

Penelitian ini penulis lakukan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu dikarenakan adanya indikasi bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa belum terlaksana seperti yang diharapkan, seperti dalam pembukuan yaitu tidak lengkapnya beberapa buah buku registrasi sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat serta keterlambatan dalam hal surat menyurat dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Banjar Seminai dalam meningkatkan program pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, questioner, wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 95 orang yang terdiri dari aparat Pemerintahan Desa dan penduduk Desa Banjar Seminai. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul, ditabulasikan menurut jenis data, dan memberikan keterangan dengan mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini, pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak di lihat menurut peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 adalah mengenai tugas-tugas perangkat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum dan kepala urusan pembangunan. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut dengan menggunakan skala likert yaitu digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak mendapat skor rata-rata 622,2 dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”. Oleh sebab itu penulis menyarankan salah satu upaya untuk mencapai pelaksanaan administrasi desa yang baik perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa dalam rangka mewujudkan desa yang otonom atau sesuai yang di harapkan kususnyanya di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 9

1.3. Tujuan Penelitian 9

1.4. Manfaat penelitian 9

1.5. Sistematika Penulisan 10

BAB II TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Administrasi..... 12

2.2. Pengertian Pemerintah 14

2.3. Pengertian Desa 16

2.4. Konsep Operasional..... 20

2.5. Kerangka Pemikiran 24

2.6. Hipotesis 25

2.7. Indikator variabel..... 25

2.8. Teknik Pengukuran..... 27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian 32

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian..... 32

3.3. Jenis dan Sumber Data..... 32

3.4. Populasi dan Sampel..... 33

3.5.	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6.	Analisa Data.....	35
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1.	Keadaan Geografis	36
4.2.	Keadaan Penduduk	37
4.3.	Mata Pencaharian	38
4.4.	Kehidupan Sosial Keagamaan	39
4.5.	Pendidikan	40
4.6.	Struktur Pemerintahan	41
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1.	Identitas Responden.....	46
5.2.	Analisa Variabel Penelitian	49
5.3.	Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator Variabel.....	78
5.4.	hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai.....	84
BAB VI	PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan	86
6.2.	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
BIOGRAFI PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Keadaan Pengisian Buku Registrasi Desa Banjar Seminai Tahun 2011	6
Tabel I.2	Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Desa Banjar Seminai Tahun 2011	7
Table I.3	Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2011	8
Tabel II.1	Operasional Indikator Variabel	26
Tabel II.2	Skala Pengukuran	27
Tabel III.1	Populasi dan Sampel untuk aparat pemerintahan desa Banjar Seminai kecamatan Dayun Kabupaten Siak	
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	38
Tabel IV.2	Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Seminai	39
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk di Desa Banjar Seminai Menurut Jenis Agama yang di Anut	39
Tabel IV.4	Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	40
Tabel IV.5	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Banjar Seminai	41
Tabel IV.6	Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2011	45
Tabel V.1	Jenis Pekerjaan Responden	47
Tabel V.2	Tingkat Pendidikan Responden	47
Tabel V.3	Tingkat Umur Responden	48
Tabel V.4	Jawaban responden mengenai keamanan dan kesejahteraan masyarakat	50
Tabel V.5	Jenis Sarana dan Prasarana Keamanan dan Sosial Masyarakat	50

Tabel V.6	Jawaban Responden Tentang Penyelenggaraan Administrasi Desa	51
Tabel V.7	Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Desa dalam Mendamaikan Perselisihan Masyarakat	52
Tabel V.8	Tanggapan Responden Tentang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan	54
Tabel V.9	Pengembangan SDA dan Pelestarian Lingkungan	54
Tabel V.10	Tanggapan Responden Tentang Tata Pemerintahan desa yang Bersih dan Bebas dari KKN	55
Tabel V.11	Tanggapan Responden Tentang Memimpin, Mengkoordinir, mengendalikan Serta Mengawasi Semua Unsur Kegiatan..	56
Tabel V.12	Tanggapan Responden Tentang Perumusan Program Kegiatan Sekretaris Desa.....	57
Tabel V.13	Perumusan Program Kegiatan Sekretaris Desa	58
Tabel V.14	Tanggapan Responden Tentang Surat Menyurat dan Kearsipan	58
Tabel V.15	Surat-menyurat dan Kearsipan di Kantor Kepala Desa Banjar Seminai	60
Tabel V.16	Tanggapan Responden Tentang Mutasi dan Pencatatan Administrasi Pemerintahan desa	61
Tabel V.17	Mutasi Dan Pencatatan Administrasi Pemerintahan Desa ..	61
Tabel V.18	Tanggapan Responden Tentang Administrasi Kependudukan Desa	62
Tabel V.19	Administrasi Kependudukan Desa Banjar Seminai Tahun 2011	63
Tabel V.20	Tanggapan Responden Tentang Pencatatan Monografi Desa	64
Tabel V.21	Monografi Desa Banjar Seminai Tahun 2012.....	65
Tabel V.22	Tanggapan Responden Tentang Pelayanan masyarakat Dalam Hal Surat-Menyurat	65
Tabel V.23	Tanggapan Responden Tentang Penyelenggaraan Buku Administrasi Peraturan dan Keputusan Desa	67

Tabel V.24	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Administrasi Pertanahan	68
Tabel V.25	Tanggapan Responden Tentang Tata Kearsipan dan Surat-Surat.....	69
Tabel V.26	Kearsipan dan Pengendalian Surat-Surat	70
Tabel V.27	Tanggapan Responden Tentang Pemeliharaan, Pendistribusian dan Penyimpanan Peralatan Kantor	71
Table V.28	Keadaan Alat-Alat Kantor Desa Banjar Seminai	72
Tabel V.29	Tanggapan Responden Tentang Inventarisasi Desa	72
Tabel V.30	Tanggapan Responden Mengenai Administrasi Kepegawaian Aparat Desa	73
Tabel V.31	Tanggapan Responden Tentang Administrasi Pembangunan Desa	74
Tabel V.32	Tanggapan Responden Tentang Pencatatan Hasil Swadaya Masyarakat	75
Tabel V.33	Tanggapan Responden Tentang Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan	76
Tabel V.34	Tanggapan Responden Tentang Menganalisa dan Pemeliharaan potensi Desa.....	77
Tabel V.35	Rekapitulasi jawaban responden tentang kinerja kepala desa dalam Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak	78
Tabel V.36	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Sekretaris Desa Dalam Pelaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.....	79
Tabel V.37	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Urusan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	80

Tabel V.38	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Urusan Umum Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	81
Tabel V.39	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Urusan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	82
Tabel V.40	Rekapitulasi Seluruh Indikator Variabel Penelitian Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dilihat dari perkembangan negara kita republik indonesia sejak dulu sampai sekarang ini bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah mengalami perubahan-perubahan, ditinjau dari segi keuangan maupun ditinjau dari segi pengawasan dan pembangunan. Suatu kenyataan bahwa pemberian sebagian kewenangan atas pemerintah pusat pada pemerintah daerah merupakan langkah awal dalam rangka mempercepat perkembangan pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena kedekatan pemerintah daerah dengan masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menunjang dalam usaha pembangunan daerah.

Pemerintah daerah di beri kewenangan yang cukup besar dalam kerangka otonomi daerah, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tujuan tersebut maka kepala daerah diberikan kewenangan untuk

melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam melaksanakan pemerintahan daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota bahwa Desa merupakan pemerintahan terendah langsung di bawah camat yang mempunyai hak penyelenggaraan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut, karena desa mempunyai hak otonomi asli yang berdasarkan asal usul desa sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya, maka pemerintah daerah harus memperhatikan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa itu sendiri, yang di laksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa karena keberhasilan pembangunan pedesaan akan sangat di tentukan oleh terciptanya tertib administrasi pemerintahan desa yang baik. Administrasi pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa. Pengelolaan dan peningkatan serta pengembangan administrasi pemerintah desa diharapkan dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi yang dibebankan kepada pemerintah desa. Dalam struktur pemerintahan desa terdapat seperangkat aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan sebagai suatu

komponen penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah desa yaitu menurut peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 adalah mengenai tugas-tugas perangkat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pembangunan masyarakat desa dan pada gilirannya dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Perangkat Pemerintah desa dalam organisasi dan tata kerja pemerintah Desa yang dimaksud adalah:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan

Sebagai pemimpin Pemerintah Desa. Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Membina kehidupan masyarakat Desa
3. Membina Perekonomian Desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa
5. Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa
6. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Berhubung pemerintah desa beserta perangkatnya merupakan penentu dalam melaksanakan dan mensukseskan program pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa maka diharapkan perangkat desa

tersebut memiliki kemampuan dan berperan dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Maka administrasi pemerintahan desa ini harus semakin meningkat agar pembangunan sistem administrasi pemerintahan desa semakin baik pula, khususnya dalam upaya mewujudkan desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Mengingat administrasi pemerintahan desa tersebut mempunyai arti yang sangat penting sebagai sumber data dan informasi mengenai masalah kependudukan dan masalah sosial ekonomi masyarakat Desa, yang kemudian menjadi sumber segala data dan informasi bagi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional, maka penataan desa sudah selayaknya mendapat perhatian terutama data yang termuat dalam buku registrasi desa.

Administrasi Desa sebagai alat penggerak Pemerintahan Desa sangat menentukan pengolahan Pemerintah Desa. Administrasi Desa meliputi:

1. Administrasi umum yang terdiri dari buku peraturan desa, buku keputusan Kepala desa, buku inventaris desa, buku agenda, buku ekspedisi, buku aparat pemerintahan desa dan buku tanah desa.
2. Administrasi kependudukan meliputi : buku induk penduduk desa, buku penduduk sementara dan buku mutasi penduduk desa
3. Administrasi keuangan desa meliputi : Buku Anggaran Desa, buku kas umum, buku kas pembantu.

Untuk dapat memberikan hasil yang optimal di dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa maka diperlukan kemampuan dan kemauan yang memadai baik dari segi kualitas maupun fasilitas yang mendukung yang pada akhirnya memberikan pelayanan yang baik bagi kemajuan desa tersebut. Keberhasilan suatu pekerjaan sangat di pengaruhi oleh sistem kerja, mutu atau kualitas orang-orangnya serta sarana yang di perlukan.

Disamping kualitas aparat Pemerintahan Desa yang relatif rendah/terbatas, maka kondisi masyarakat di desa dipengaruhi pelaksanaan tugas-tugas dari Pemerintahan Desa.

Sebagaimana yang terdapat di Desa Banjar Semnai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak mempunyai pemerintahan desa dan perangkat desa, serta kantor kepala desa yang memadai sebagai tempat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. Tetapi pada kenyataanya aparat pemerintahan desa tidak dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik, hal ini dapat dilihat dari fenomena-fenomena yaitu tidak lengkapnya babarapa buah buku registrasi sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat dan ketika masyarakat ingin melakukan pengurusan administrsi tentang surat menyurat menjadi lambat. Keterlambatan dalam surat menyurat itu dikarenakan ketika masyarakat ingin mengurus tentang administrasi harus menunggu terkumpul banyak kalau hanya satu orang saja yang mengurus tentang administrasi aparat desa tidak mau mengantarkan ketingkat atasan karena harus menunggu banyak baru diantarkan ketingkat atasan. Adapun bentuk administrasi tersebut antara lain adalah:

1. Administrasi kependudukan seperti Pembuatan KK, Pembuatan KTP dan Pembuatan Surat AKTE.
2. Administrasi umum seperti Surat Domisili, Surat Pernyataan (Pecah KK dan Pindah KK), Surat Pindah dan Surat Tanah

Kemudian bentuk administrasi yang tidak dapat di laksanakan dengan sepenuhnya dapat di lihat dari data berikut :

A. Pengisian buku registrasi seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 Keadaan Pengisian Buku Registrasi Desa Banjar Seminai Tahun 2011

No	Buku Registrasi	Desa Banjar Seminai	
		Lengkap	Tdk. Lengkap
1.	Buku Data Keputusan Desa	-	X
2.	Buku Inventaris Desa	X	-
3.	Buku Tanah Desa	-	X
4.	Buku Agenda	X	-
5.	Buku Expedisi	-	X
6.	Buku Data Induk Penduduk	X	-
7.	Buku Data Penduduk	-	X
8.	Buku Data Penduduk Sementara	-	X
9.	Buku Rencana Pembangunan	-	X
10.	Buku Kegiatan Pembangunan	-	X
11.	Buku Kader-Kader Pembangunan	-	X
12.	Buku Kas Umum	X	-
13.	Buku Anggaran Penyelenggaraan Rutin	X	-
14.	Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	-	X
15.	Buku Inventaris Proyek	-	X
16.	Buku Data Peraturan Desa	-	X
17.	Buku Pembantu Kas Pengeluaran	-	X
18.	Buku Kas Pengeluaran Rutin	X	-
19.	Buku Kas Pembantu Penerimaan	-	X
20.	Buku Anggaran Penyelenggaraan Pembangunan	X	-
21.	Buku Aparat Pemerintahan Desa	X	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2011

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa tidak lengkapnya beberapa buah buku registrasi desa sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat, dimana dari 21 jumlah buku registrasi, yang dapat di isi dengan baik dan lengkap sebanyak 8 buku dan buku registrasi yang diisi tetapi tidak lengkap sebanyak 13 buku. Dari tidak lengkapnya beberapa buah buku registrasi yang tidak diisi dengan lengkap maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kurang baik. Dimana dengan adanya kelengkapan buku-buku registrasi sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat menunjukkan adanya tertib administrasi yang mempermudah bagi aparat pemerintahan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

B. Kurangnya tingkat pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan Desa Banjar Seminai Tahun 2011

No.	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Kepala Desa	SMP
2.	Sekretaris Desa	SMP
3.	Kaur Umum	SMK
4.	Kaur Pemerintahan	SMA
5.	Kaur Pembangunan	SMA
6.	Kadus I	SMP
7.	Kadus II	SMA
8.	Kadus III	SMP
9.	Kadus IV	SMP

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2011

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan Kurangnya tingkat pendidikan atau kualitas dari aparat pemerintahan desa yang relatif rendah yang menyebabkan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa belum berdaya guna yaitu Kepala desa hanya tamatan SMP, Sekretaris Desa

hanya tamatan SMP, Kaur Umum hanya tamatan SMK, Kaur Pemerintahan hanya tamatan SMA, Kaur Pembangunan hanya tamatan SMA, Kadus I hanya tamatan SMP, Kadus II hanya tamatan SMA, Kadus III hanya tamatan SMP, dan Kadus IV hanya tamatan SMP. Dengan adanya pendidikan yang rendah menghambat pelaksanaan administrasi karena kurangnya pengetahuan dan skill yang di miliki oleh aparat pemerintahan desa kurang berdaya guna.

C. Kurangnya sarana dan prasarana desa dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel I.3 Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2011

No.	Jenis Alat-Alat Kantor	Unit	Kondisi
1.	Alat Komunikasi	-	-
2.	Computer	2	Kurang baik
3.	Mesin Tik	1	Baik
4.	Meja Kerja	11	Baik
5.	Kursi	7	Baik
6.	Ruang Kerja	3	Baik
7.	Lemari Arsip	2	Baik
8.	Papan Pengumuman	1	Baik
9.	Ruang Tunggu	1	Baik

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2011

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa kurangnya sarana dan prasarana desa penunjang proses administrasi seperti Alat Komunikasi : 0 unit, Computer hanya 2 unit, Mesin Tik hanya 1 unit, Meja Kerja hanya 11 unit, Kursi hanya 7 unit, Ruang Kerja hanya 3 unit, Lemari Arsi hanya 2 unit, Papan Pengumuman hanya 1 unit, dan Ruang Tunggu hanya 1 unit. Dari kurangnya sarana peralatan kantor sebagai penunjang dalam pelaksanaan administrasi membuat pelaksanaan administrasi pada desa banjar seminai kurang baik.

Dari gejala-gejala di atas maka perlu diadakan **“Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”** yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalahnya yaitu: **“Bagaimanakah Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam melaksanakan administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintahan desa, khususnya pada Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun dan pemerintahan desa pada umumnya dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa agar efektif.
3. Sebagai pengetahuan serta pandangan dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan desa.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dari penulisan ini, penulis membaginya ke dalam enam bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan dan konsep operasional.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan waktu dan tempat, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisa data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran objek yang akan di teliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas hasil dari penelitian tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan serta kritik dan saran yang membangun.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

1.1. Pengertian Administrasi

Menurut Kusdi (2009 : 7) Bahwa administrasi adalah “cara atau sarana menggerakkan organisasi dengan tugas mengarahkan organisasi mencapai tujuan-tujuan yang di inginkan”.

Husein Umar (2004 : 2) Mengatakan administrasi merupakan sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Sedangkan menurut Sumber Saparin (1999 : 28) mengatakan administrasi dalam arti sempit merupakan kegiatan pencatatan, penyimpilan dan retribusi daripada surat-surat, data-data, informasi, dokumen-dokumen dalam suatu kantor atau unit kerja atau instansi, berdasarkan sistem dan cara tertentu.

H.W. Wijaya (2003 : 87) mengatakan bahwa kata administrasi berasal dari bahasa latin, administrate yang artinya adalah melayani, membantu dan memenuhi, sehingga administrasi berarti segala upaya mendukung segala proses pelaksanaan kerjasama kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi dalam pengertian diatas mempunyai unsur-unsur yaitu:

1. Organisasi,
2. Manajemen,
3. Kapegawaian,
4. Keuangan,
5. Perbekalan,
6. Komunikasi,
7. Perwakilan/humas, dan
8. Ketatausahaan.

Selain daripada itu istilah administrasi di Indonesia juga dipakai dalam arti tatausaha cara yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia untuk istilah administrasi dalam bahasa Belanda (H.AW.Widjaja, 2002:87).

Demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa harus di dukung dengan tata usaha yang benar. Dimana Tata usaha itu merupakan kegiatan mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang di sebut administrasi desa.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa (Hanif Nurcholis, 2011 : 135).

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 136) Administrasi desa terdiri atas :

1. Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum.

2. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.
3. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan.
4. Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan.
5. Administrasi BPD adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai BPD.
6. Administrasi lainnya adalah administrasi selain kelima administrasi tersebut yang dianggap penting oleh desa.

1.2. Pengertian Pemerintah

Menurut Inu Kencana Syafii (2003 : 134) Pemerintahan berarti perihal, cara, perebutan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Sedangkan menurut Taliziduhu Ndaraha (2003 : 7) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang di perintah.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan lembaga masyarakat desa, yang di bantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan

kepala-kepala dusun. Hal itu diatur oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 1/1981, khususnya tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa (Soerjono Soekanto, 1986 : 22).

Pemerintah daerah merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang berupa suatu sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat dirumuskan dari berbagai segi yakni :

- a. Dari segi politis yang bertujuan untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam setiap pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Dari segi formal dan konstitusional yang bertujuan untuk melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945 dan GBHN.
- c. Dari segi operasional yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.
- d. Dari segi administrasi pemerintah, yang bertujuan untuk lebih memperlancar dan menerbitkan pelaksanaan tata pemerintahan dan dapat terselenggara secara efisien, produktif (M.Situmorang, 1994 : 31-32).

1.3. Pengertian Desa

Menurut C.S.T. Kansil (2001 : 58) Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa dalam pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat.

Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa memerlukan dukungan sistem administrasi yang memadai, berkaitan dengan hal itu Bintaro Cokro Amijoyo (2002 : 8) mengatakan administrasi merupakan suatu fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator, dibantu tim bawahannya, terutama oleh manajer dan staper.

Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.76 tahun 2001 yaitu:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Membina kehidupan masyarakat desa.
3. Membina perekonomian masyarakat desa.
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.

6. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Desa juga mempunyai kewenangan desa, kewenangan desa itu mencakup :

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan/pemerintah kabupaten (Deddy Supriadi Bratakusumah, 2001 : 25-26).

Hak-hak otonomi yang dimiliki desa tidak sama dengan yang dimiliki daerah, otonomi desa dan hukum adat, ruang lingkupnya sebatas desa dan dilaksanakan oleh kepala desa. Dalam pelaksanaannya kepala desa bertanggung jawab kepada bupati melalui camat selaku atasan langsung, di samping itu kepala desa memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa harus sejalan dan seirama dengan maksud dan tujuan peraturan pemerintah No 76 tahun 2001, dan untuk mampu melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hal-hal yang menyebabkan administrasi pemerintahan desa kurang berkembang adalah:

1. Pembatasan yang disebabkan oleh pengaruh tradisi setempat dalam proses organisasi dan tata cara Pemerintahan Desa.
2. Kurang tersedianya dana atau anggaran yang cukup untuk mengelola kepentingan Administrasi Desa.

3. Belum dilaksanakan secara insentif sistem administrasi dan manajemen dalam pengelolaan kepentingan Pemerintahan Desa.
4. Mengalirnya tenaga yang mendapatkan pendidikan yang cukup ke kota-kota mencari nafkah.
5. Sehingga desa tetap kekurangan tenaga yang terdidik. (Sumber Saparin: 54)

Dalam pelaksanaan administrasi pemerintah desa yang baik tergantung kepada kemampuan aparat pemerintah desa serta sarana dan prasarana yang tersedia (Soewarno Handyaningrat, 2001 : 5).

Dengan demikian selain daripada kualitas dan kemampuan aparat pemerintah desa, pelaksana administrasi desa yang baik tergantung juga kepada tersedianya sarana dan prasarana. Namun sarana yang lengkap itu tidak akan berarti apabila aparat pemerintah desa yang bersangkutan tidak mampu mengelola dengan baik.

Kualitas dan kemampuan hanya dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan dalam berbagai bentuk seperti: latihan jabatan, seminar, konferensi, symposium, coaching dan pendidikan akademi. (S.P.Siagian, 2003 :122)

Untuk dapat mengelola dengan baik aparat pemerintahan desa harus mempunyai kualitas dan kemampuan dimana itu semua dapat didukung dengan mengadakan pendidikan dan latihan dalam berbagai bentuk. Setelah mengikuti pelatihan tersebut, diharapkan nantinya aparatur pemerintahan desa dapat menjalankan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik menurut tugas dan fungsinya masing-masing. Aparat atau karyawan untuk memungkinkan

bekerja secara efisien harus mempunyai keinginan bekerja, kemauan bekerja dan kemahiran dalam bekerja.

Keinginan bekerja dipengaruhi oleh adanya perangsang seperti gaji yang memadai sesuai dengan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kualitas dan kemampuan dan kemahiran bekerja di pengaruhi oleh pendidikan, latihan pengalaman bekerja (Abdurrahman, 1999: 110).

Menurut Manullang (1998 : 82) bahwa hampir tidak ada seseorang yang mampu melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan dengan baik bila mana tidak dipelajari terlebih dahulu bahkan sungguhpun pekerjaan itu tampak mudah, selalu orang yang mempunyai pengalaman mengalami kesulitan dalam melaksanakan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan, latihan dan pengalaman yang dimiliki oleh aparatur desa mempunyai arti yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintah desa yang mampu melaksanakan administrasi pemerintahan desa.

1.4. Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, seperti persepsi atau menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran

terhadap konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing-masing konsep tersebut yaitu sbagai berikut:

1. Administrasi adalah merupakan sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintahnya.
3. Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan administrasi pemerintahan desa sebagaimana menurut peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 adalah mengenai tugas-tugas perangkat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa yaitu:

1. Kepala Desa
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Peraturan Perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

p. Memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

2. Sekretaris Desa

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur atau kegiatan Sekretaris Desa.
- c. Merumuskan program kegiatan kepada Kepala Desa.
- d. Melaksanakan unsur surat-menyurat, kearsipan dan menyusun laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- e. Menyusun Rancangan APB Desa.
- f. Melaksanakan administrasi keuangan.
- g. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- h. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan bidang tugas kesekretariatan.
- i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan desa.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3. Kepala Urusan Pemerintahan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- b. Kegiatan administrasi pertanahan.
- c. Pencatatan monografi Desa.
- d. Kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil.
- e. Penyelenggaraan buku administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Desa.
- f. Tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Urusan Umum

- a. Melaksanakan tata kearsipan dan pengendalian surat masuk dan keluar.
- b. Mempersiapkan mencatat hasil rapat atau persidangan dan naskah lainnya.
- c. Memelihara, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor.
- d. Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa.
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat Desa.
- f. Pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
- g. Mempersiapkan penerimaan tamu kedinasan di Desa.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diurus oleh urusan lainnya.
- i. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

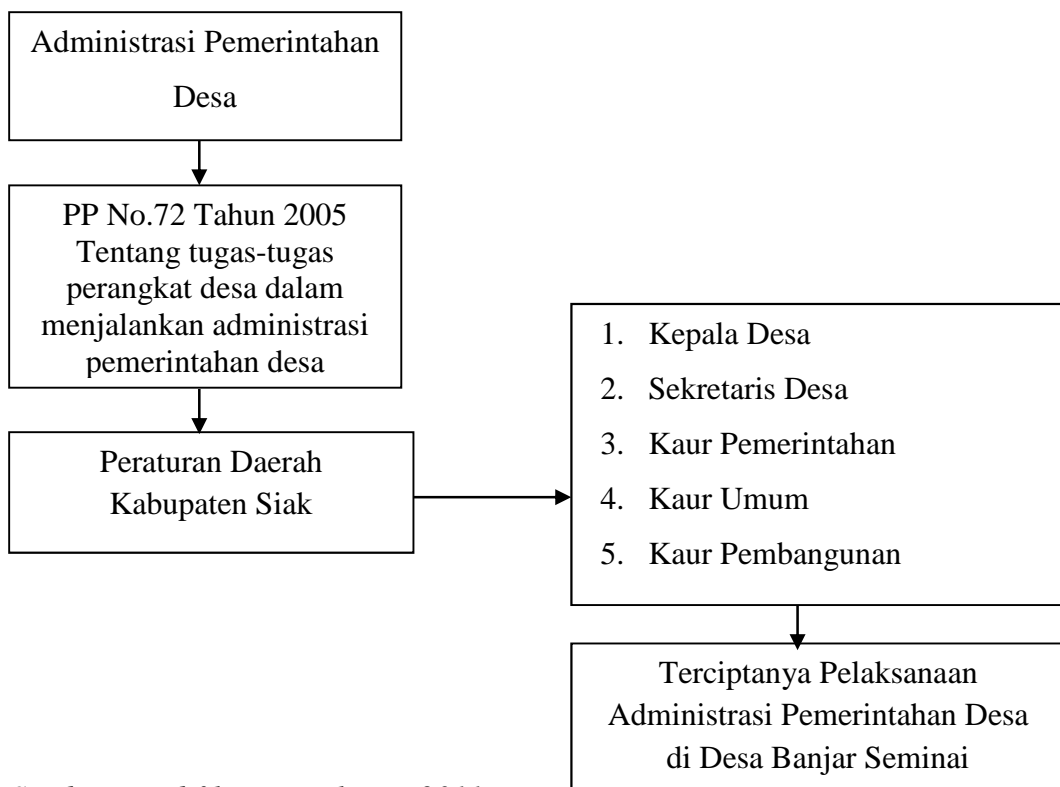
5. Kepala Urusan Pembangunan

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa.
- b. Pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa.
- c. Menghimpun, menganalisa dan memelihara potensi desa.
- d. Mencatat dan mempersiapkan bahan usulan kegiatan pembangunan Desa.
- e. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.5. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka dapat dilihat bagan dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak



Sumber: Modifikasi Penelitian, 2011

1.6. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dengan bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat juga menyatakan jawaban yang empiric (Sugiyono, 2005:70).

Berdasarkan latar belakang, dan perumusan masalah diatas serta dihubungkan dengan teori-teori yang telah diuraikan, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa: *“Diduga Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Belum Terlaksana Dengan Baik”*.

1.7. Indikator Variabel

Untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dapat dilihat menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 adalah mengenai tugas-tugas perangkat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa, antara lain:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kepala Urusan Pemerintahan
4. Kepala Urusan Umum
5. Kepala Urusan Pembangunan

Adapun operasional indikator variabel penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel II.1 Operasional Indikator Variabel

Variabel 1	Indikator 2	Sub Indikator 3
Administrasi pemerintahan desa	1. Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat b. Kemampuan menyelenggarakan administrasi desa c. Mendamaikan perselisihan atau persengketaan tanah masyarakat d. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup e. Melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN
	2. Sekretaris Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsure kegiatan b. Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa c. Melaksanakan unsure surat-menyurat dan kearsipan d. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi dan pencatatan administrasi pemerintahan desa
	3. Kepala Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan desa b. Melaksanakan pencatatan monografi desa c. Melaksanakan dan pemberian terhadap masyarakat dalam hal surat-menyurat d. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan keputusan desa e. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan
	4. Kepala Urusan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan tata kearsipan dan mengendalikan surat-surat b. Melaksanakan pemeliharaan, pendistribusian dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor c. Mencatat inventarisasi kekayaan desa d. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa
	5. Kepala Urusan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa c. Daftar usulan kegiatan pembangunan d. Menganalisa dan memelihara potensi desa.

Sumber : Data Olahan Penelitian 2011

1.8. Teknik Pengukuran

Untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak, maka penulis melakukan pengukuran terhadap setiap indikator variabel penelitian ini dengan menggunakan *skala likert*.

Menurut Sugiyono (2009: 107) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Untuk keperluan analisis dalam penelitian ini, maka jawaban setiap item instrument dari responden dalam Questioner dibedakan dalam tiga kategori dalam nilai skor seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel II.2 Skala Pengukuran

No	Kategori	Skor
1.	Baik	3
2.	Cukup Baik	2
3.	Kurang Baik	1

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2011

Kemudian untuk menganalisis masing-masing indikator variabel penelitian, terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Tertinggi: Jumlah Sub Indikator x Jumlah Resonden x Nilai Tertinggi

Skor Terendah: Jumlah Sub Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah

$$\text{Interval} : \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Skala}}$$

Dari formula diatas dapat diketahui bahwa:

- a. Teknik pengukuran untuk 5 sub indikator

$$\text{Skor Tertinggi} : 5 \times 95 \times 3 = 1.425$$

$$\text{Skor Terendah} : 5 \times 95 \times 1 = 475$$

$$\text{Interval} : \frac{1.425 - 475}{3} = 316,6$$

- b. Teknik pengukuran untuk 4 sub indikator

$$\text{Skor Tertinggi} : 4 \times 95 \times 3 = 1.140$$

$$\text{Skor Terendah} : 4 \times 95 \times 1 = 380$$

$$\text{Interval} : \frac{1.140 - 380}{3} = 253,3$$

Dari hasil di atas, untuk mengetahui penilaian dari masing-masing indikator variabel tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa maka dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kepala desa, pengukurannya dengan 5 sub indikator yang dinilai, dengan 95 responden dengan skor tertinggi 1.425 dan skor terendah 475 dengan nilai interval 316,6 dapat dinyatakan:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 1.108,4 –1.425.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 791,7-1.108,3.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 475-791,6.

2. Sekretaris Desa, pengukuran dengan 4 sub indikator yang dinilai, dengan 95 responden dengan skor tertinggi 1.140 dan skor terendah 380 dengan nilai interval 253,3, dapat dinyatakan:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 886,7-1.140.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 633,4-886,6.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 380-633,3.

3. Kepala Urusan Pemerintahan, pengukurannya dengan 5 sub indikator yang dinilai, dengan 95 responden dengan skor tertinggi 1.425 dan skor terendah 475 dengan nilai interval 316,6 dapat dinyatakan:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 1.108,4 –1.425.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 791,7-1.108,3.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 475-791,6.

4. Kepala Urusan Umum, pengukuran dengan 4 sub indikator yang dinilai, dengan 95 responden dengan skor tertinggi 1.140 dan skor terendah 380 dengan nilai interval 253,3, dapat dinyatakan:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 886,7-1.140.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 633,4-886,6.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 380-633,3.

5. Kepala Urusan Pembangunan, pengukuran dengan 4 sub indikator yang dinilai, dengan 95 responden dengan skor tertinggi 1.140 dan skor terendah 380 dengan nilai interval 253,3, dapat dinyatakan:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 886,7-1.140.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 633,4-886,6.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 380-633,3.

Kemudian untuk menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa banjar semina kecamatan dayun kabupaten siak, terlebih dahulu harus diketahui nilai intervalnya dengan menggunakan formula:

Skor Rata-rata Tertinggi : Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Tertinggi

Skor Rata-rata Terendah : Jumlah Indikator x Jumlah Responden x Nilai Terendah

interval :
$$\frac{\text{Skor Rata - rata Tertinggi} - \text{Skor Rata - rata Terendah}}{\text{Skala}}$$

Dari formula diatas dapat diketahui bahwa:

$$\text{Skor Rata-rata Tertinggi} : 5 \times 95 \times 3 = 1.425$$

$$\text{Skor Rata-rata Terendah} : 5 \times 95 \times 1 = 475$$

$$\text{Interval} : \frac{1.425 - 475}{3} = 316,6$$

Dari hasil diatas, untuk mengetahui penilaian variabel pelaksanaan administrasi pemerintahan desa secara keseluruhan adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil rekapitulasi setiap sub indikator variabel dan dibagi dengan jumlah indikator variabel penelitian.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak, pengukurannya dengan 5 indikator variabel yang dinilai dengan skor rata-rata

Tertinggi 1.425 dan skor rata-rata terendah 475 dengan nilai interval 316,6, dapat dinyatakan:

Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 1.108,4 –1.425.

Cukup Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 791,7-1.108,3.

Kurang Baik : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari questioner berada pada interval 475-791,6.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik untuk satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Adapun penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.

1.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang mempunyai jumlah penduduk 2478 jiwa. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember sampai dengan bulan Februari Tahun 2012.

1.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, yaitu berupa informasi dari wawancara dan questioner.

2. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dapat menunjang aspek yang di teliti mengenai demografi Desa Banjar Seminai.

1.4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi atas objek dan subjeknya yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2007 : 90)

2. Sampel

Sampel adalah sebagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (Sugiono, 2007 : 90)

Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun sebanyak 10 orang ditambah dengan masyarakat sebanyak 582 Kepala Keluarga.

Pengambilan sampel untuk aparat desa diambil semuanya (100%) dengan menggunakan teknik sensus karna jumlahnya yang sedikit, sedangkan pengambilan sampel untuk masyarakat mengambil 10% dari Kepala Keluarga, dengan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2007 : 96). Untuk masyarakat yang berjumlah 582 orang, maka menarik sampel dengan menggunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Keterangan :

n : Sampel

N : Populasi

e : Tingkat Kesalahan

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

$$n = \frac{582}{1 + 582 \cdot (0,1)^2}$$

$$n = \frac{582}{6,82}$$

$$n = 85$$

Tabel III.1 Populasi dan Sampel untuk aparat pemerintahan desa Banjar Seminai kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Kepala Urusan	3	3	100%
4.	Badan	1	1	100%
5.	Permusyawaratan Desa Kepala Dusun	4	4	100%
Jumlah Populasi dan Sampel		10	10	

Sumber: Kantor Desa Banjar Seminai 2011

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data di atas dikumpulkan dengan cara :

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, dengan melihat kondisi yang ada.
- b. Questioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang utama, jenis wawancara yang dilakukan bersifat tidak terstruktur, wawancara dilakukan secara mendalam terhadap pihak-pihak terkait dengan masalah penelitian yang telah di pilih sebelumnya, yakni seluruh aparat pemerintahan desa, serta sebagian dari masyarakat yang diambil sebagai sampel.

3.6. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina kecamatan dayun kabupaten siak berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori dan memberikan keterangan yang mendukung untuk menjawab masing-masing masalah, serta memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Keadaan Geografis

Desa Banjar Seminai merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Adapun batas-batas wilayah Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Berumbang Baru Kecamatan Dayun kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan Makmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Perkebunan PTP.V Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Desa Banjar Seminai mempunyai 4 Dusun (Dusun Banjar Agung, Dusun Banjar Tengah, Dusun Suka Jaya dan Dusun Inti II. Dimana setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun atau Kadus), 7 RW, 21 RT dan satu kelurahan dengan luas wilayah 1.665 km terdiri dari Tanah Pekarangan 125 km, Tanah Tegalan 125 km, Perladangan 1.000 km dan lain-lain 415 km, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.478 jiwa. Pola tata desanya dipengaruhi oleh keadaan geografis yang merupakan daerah dataran sedang, yaitu pola

perkampungan yang berkelompok dan menyebar memanjang mengikuti jalan raya. Keadaan iklim di Desa Banjar Seminai adalah beriklim tropis, dimana terdapat dua musim dalam satu tahun yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan tanah atau topografi sebagian besar terdiri dari dataran rendah karena terdapat perkebunan kelapa sawit dengan kondisi tanah (fisiografi) pada lapisan atas berwarna hitam dan lapisan bawah berwarna kuning.

4.2. Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang paling menentukan gerak langkah pembangunan nasional maupun pembangunan desa. Karena penduduk disamping subjek dalam pembangunan juga sebagai objek pembangunan itu sendiri. Masalah kependudukan yang penyebarannya kurang merata juga akan mempengaruhi usaha-usaha pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan dalam memenuhi kepentingan masyarakat yang menciptakan sinkronisasi, keharmonisan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya keterpaduan dan keselarasan maka harapan untuk mencapai pembangunan desa yang di idam-idamkan dapat terwujud.

Jumlah penduduk dari Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak adalah 2.478 jiwa yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Jumlah Penduduk Desa Banjar Seminai	Jenis Kelamin		Jumlah KK
	Laki-Laki	Perempuan	
2.478	1.290	1.188	582

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

4.3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus akan turut menentukan kelangsungan hidup mereka sendiri. Mata pencaharian penduduk Desa Banjar Seminai beraneka ragam, dan sebagian besar didominasi oleh para petani kelapa sawit. Selain itu ada juga Berdagang, Buruh, Guru, PNS dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu masyarakat juga bekerja sebagai petani sawit dari kebun mereka sendiri, namun sebagian kecil masyarakat Desa Banjar Seminai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masih ada yang mengandalkan menjadi buruh petani sawit dan buruh bangunan.

Untuk lebih jelas tentang mata pencaharian penduduk Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa Banjar Seminai

Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
Pegawai Negeri Sipil	20
Guru	9
TKI	-
Pertanian	468
Buruh Tani	30
Swasta	267
Industri	11
Perdagangan	24
Jasa Lainnya	20
Tidak Bekerja	135
Jumlah	984

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

4.4. Kehidupan Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam yaitu 99% kemudian Kristen 1%. Adapun masyarakat yang beragama Kristen ini adalah pendatang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk di Desa Banjar Seminai Menurut Jenis Agama yang di Anut

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	2435	98,26
2	Kristen	43	1,74
Jumlah		2.478	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

Untuk menunjang rutinitas peribadatan di Desa Banjar Seminai perlu kiranya dibangun tempat beribadah. Adapun jumlah sarana ibadah di Desa Banjar Seminai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.4 Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Tempat ibadah	Jumlah	Persentase
-----------	----------------------	---------------	-------------------

1	Masjid	4	25 %
2	Mushala/Surau	10	62,5 %
3	Gereja	2	12,5 %
Jumlah		16	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

Dari tabel diatas menunjukkan tempat dan jumlah peribadatan penduduk di desa banjar seminai di dominan oleh agama islam yaitu di lihat dengan banyaknya masjid atau mushala yang ada di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak.

4.5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat sumber daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. Pendidikan perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada diwilayah Desa Banjar Seminai mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat SLTA telah ada. Untuk mengetahui jumlah prasarana pendidikan yang ada di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
PAUD	2	-	2
TK	2	-	2
SD	2	-	2
SLTP	1	-	1
Jumlah	7		7

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

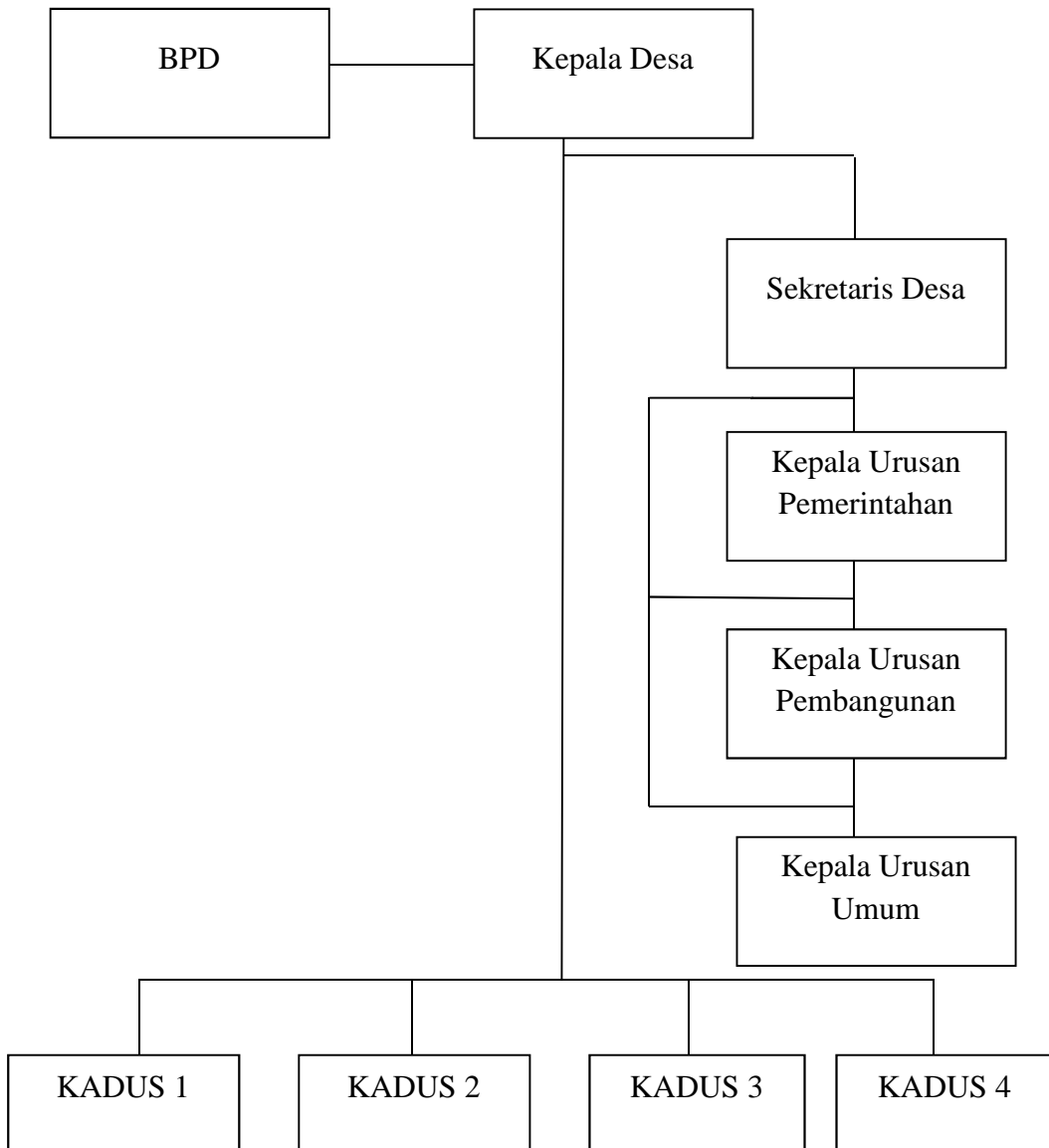
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak gedung sekolah mulai dari PAUD, TK, SD masing-masing terdapat 2 unit dan SLTP hanya 1 unit sedangkan untuk tingkat SMA tidak ada.

4.6. Struktur Pemerintahan

Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak tidak berbeda jauh dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak di pimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk melalui proses pemilihan kepala desa langsung dengan system demokrasi dan mengutamakan pemilihan putra terbaik dari desa dan memahami tentang pemerintahan desa. BPD bertugas sebagai pengawas dalam setiap kegiatan yang di lakukan oleh kepala desa, dan BPD bertugas merumuskan peraturan desa bersama kepala desa. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Desa yang mewakili Kepala Desa dalam mengkoordinir tugas-tugas yang akan di laksanakan oleh kepala desa. Untuk mempermudah pelaksanaan administrasi di desa di bantu oleh beberapa kepala urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Pembangunan.

Untuk mengetahui suatu struktur organisasi pemerintahan di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak dapat di lihat dari gambar berikut ini:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak



Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

Berdasarkan gambar 1 diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi dalam struktur organisasi pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa

- a. Kedudukan: Sebagai pelaksana penyelenggara pemerintahan desa
- b. Tugas: Menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Fungsi: melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga, membina perekonomian desa, kordinasi, menggerakkan peran masyarakat dalam pembangunan, melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya.

2. Sekretaris Desa

- a. Kedudukan: Sebagai unsure staf membantu bidang Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.
- b. Tugas: Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan, serta pelayanan ketata usahaan desa.
- c. Fungsi: Melaksanakan tata kearsipan, urusan surat-menyurat, melaksanakan keuangan dan melaksanakan urusan administrasi umum serta melaksanakan tugas kepala desa dalam segala hal bila kepala desa berhalangan.

3. Kepala Urusan

- a. Kedudukan: Sebagai tugas pembantu tugasnya masing-masing.

- b. Tugas: Melaksanakan kegiatan ketata usahaan dalam bidang tugasnya masing-masing.
- c. Fungsi: melaksanakan pencatatan, pengumpulan, pengelolaan data dan informasi yang menyangkut bidang penyusunan tugasnya masing-masing.

4. Kepala Dusun

- a. Kedudukan: Sebagai pembantu Kepala Desa dalam wilayah kerjanya.
- b. Tugas: Menjalankan kegiatan yang dilimpahkan oleh Kepala Desa, melaksanakan pemerintah desa dibawah kepemimpinan kepala desa wilayah kerjanya.
- c. Fungsi: Melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan kemasyarakatan diwilayah kerjanya. (Pemerintah Daerah kabupaten Siak No.14 tahun 2007: Pasal 4 sampai Pasal 13)

Desa Banjar Semina Kecamatan Dayu Kabupaten Siak telah mempunyai pemerintahan desa dan perangkat desa, serta kantor kepala desa yang sangat memadai sebagai tempat untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa. Namun pelaksanaan administrasi desa tidak seperti yang kita harapkan karena sarana dan prasarana penunjang tidak memadai untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.6 Sarana dan Prasarana Penunjang Proses Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2011

No.	Jenis Alat-Alat Kantor	Unit	Kondisi
1.	Alat Komunikasi	-	-
2.	Computer	2	Kurang Baik
3.	Mesin Tik	1	Baik
4.	Meja Kerja	11	Baik
5.	Kursi	7	Baik

6.	Ruang Kerja	3	Baik
7.	Lemari Arsip	2	Baik
8.	Papan Pengumuman	1	Baik
9.	Ruang Tunggu	1	Baik

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, seorang kepala desa di bantu oleh seorang Sekretaris Desa dan beberapa orang Kepala Urusan. Kepala desa merupakan aksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan dilakukan pengawasan oleh legislative desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada pihak perangkat desa dan masyarakat yang dipilih sebagai responden dalam ini untuk memberikan tanggapannya tentang aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak. Penyajian data tersebut diuraikan dalam bentuk deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara penyebaran questioner, observasi, wawancara serta mengambil referensi dari buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Questioner yang di sebar sebanyak 95 sesuai dengan jumlah sampel yang diambil menjadi responden dalam penelitian ini. Setiap jawaban dari pertanyaan dalam questioner akan di distribusikan dalam bentuk tabel frekuensi.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dari setiap jawaban questioner, di bawah ini akan disajikan tabel-tabel yang disertai jawaban responden yang kemudian diinterpretasikan sebagai berikut:

1.1. Identitas Responden

Untuk mengetahui lebih mudah tentang kondisi responden, penulis perlu menjelaskan identitas responden. Adapun beberapa aspek yang perlu diamati dari responden sebagai objek penelitian, yaitu jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan umur responden.

1. Jenis Pekerjaan Responden

Dibawah ini merupakan data berdasarkan jenis pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri	10	11%
2	Wiraswasta	23	24%
3	Petani	62	65%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jenis pekerjaan dari 95 responden yang terbanyak terdiri dari petani sebanyak 62 orang atau 65%, wiraswasta sebanyak 23 orang atau 24%, dan responden terendah yaitu pegawai negeri sebanyak 10 orang atau 11%. Jenis pekerjaan diperlukan dalam penelitian ini guna memberikan gambaran mengenai identitas para responden yang akan menjawab maksud dan tujuan penelitian ini.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.2 Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SD	34	35.8%
2	SMP	28	29.5%
3	SMA	23	24.2%
4	Diploma	7	7.4%
5	Sarjana	3	3.2%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa tingkat pendidikan dari responden yaitu pada tingkat SD sebanyak 34 orang atau 35,8%, tingkat

SMP sebanyak 28 orang atau 29,5%, tingkat SMA sebanyak 23 orang atau 24,2%, tingkat Diploma sebanyak 7 orang atau 7,4% serta tingkat Sarjana sebanyak 3 orang atau 3,2%.

Dari uraian diatas, dapat dinyatakan bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak sebagai warga masyarakat di desa banjar semina yaitu pada pendidikan tingkat SD dan pendidikan tingkat Sarjana terkecil pada jumlah responden. Hal ini menunjukkan bahwa dari beragam tingkat pendidikan responden sebagai warga masyarakat dan beragam pula jawaban dari masing-masing responden mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

3. Tingkat Umur Responden

Untuk mengetahui tingkat umur responden dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.3 Tingkat Umur Responden

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	18-30	8	8%
2	31-35	14	15%
3	36-40	35	37%
4	>40	38	40%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat umur responden pada tingkat 18-30 tahun sebanyak 8 orang atau 8%, responden pada tingkat 31-35 tahun sebanyak 14 orang atau 15%, responden pada tingkat 36-40 tahun sebanyak 35 orang atau 37% serta responden pada tingkat >40 tahun sebanyak 38 orang atau 40%.

1.2. Analisa Variabel Penelitian

1. Kepala Desa

Pelayanan administrasi yang di maksud disini adalah kemampuan aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dalam berbagai kepentingan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama badan permusyawaratan desa. Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun, dan dapat di perpanjang selama 1 kali masa jabatan lagi. Kepala desa di tuntut selalu siap untuk melayani segala urusan masyarakat baik dalam bidang administrasi maupun urusan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Adapun tugas kepala desa yang merupakan sebagai sub indikator dalam menjalankan pemerintahan agar terwujudnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa antara lain:

a. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai tugas kepala desa dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dengan jumlah responden 95 orang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.4 Jawaban responden mengenai keamanan dan kesejahteraan masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	19%
2	Cukup Baik	23	24%
3	Kurang Baik	54	57%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas menunjukkan, bahwa keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tugas dari kepala desa yang menyatakan baik sebanyak 18 orang atau 19%, kemudian yang menyatakan cukup baik sebanyak 23 orang atau 24 %, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 54 orang atau 57%.

Dari tanggapan responden tersebut dapat dinyatakan bahwa, usaha kepala desa dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat belum maksimal atau kurang baik. Adapun data pendukung mengenai jenis sarana dan prasarana keamanan dan sosial masyarakat yang telah dijelaskan diatas dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 Jenis Sarana dan Prasarana Keamanan dan Sosial Masyarakat

No	Jenis Sarana yang Dibangun	Lokasi Pembangunan	Kondisi
1.	Poskamling	Desa Banjar Seminai	Kurang Baik
2.	Jalan Desa	Desa Banjar Seminai	Kurang Baik
3.	Masjid	Dusun Banjar Tengah	Kurang Baik

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

Dari tabel diatas dapat dilihat pembentukan sarana dan prasarana keamanan dan sosial masyarakat banjar seminai dalam kondisi kurang

baik. Menurut hemat penulis hal ini dikarenakan tidak terbentuknya sarana dan prasarana dengan baik seperti kurang layakannya dalam pembangunan poskamling karna tidak terurus lagi dengan baik sebagai sarana tempat untuk ronda malam dalam meningkatkan keamanan bagi masyarakat setempat tidak dijalankan lagi. Kemudian jenis sarana lain yang di bangun seperti masjid yang merupakan bentuk sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum terlaksana dengan baik dimana pembangunan yang telah di rencanakan belum selesai juga sampai sekarang seperti apa yang di harapkan. Selain masjid bentuk sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan jalan desa yang belum di bangun dengan baik dapat penulis ketahui dengan banyaknya jalan-jalan yang masih berlobang di desa banjar semina.

b. Kemampuan menyelenggarakan administrasi desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai tugas kepala desa mengenai kemampuan menyelenggarakan administrasi desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 Jawaban Responden Tentang Penyelenggaraan Administrasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	21	22%
2	Cukup Baik	16	17%
3	Kurang Baik	58	61%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas menunjukkan, bahwa tanggapan responden mengenai penyelenggaraan administrasi desa dari 95 orang responden

yang menyatakan baik sebanyak 21 orang atau 22%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 16 orang atau 17%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 58 orang atau 61%.

Dari tanggapan responden di atas dapat penulis simpulkan bahwa, kemampuan kepala desa dalam menyelenggarakan administrasi desa dalam kategori kurang baik. Menurut pengetahuan penulis, yang di maksud penyelenggaraan administrasi desa disini adalah seperti kegiatan melakukan koordinasi kepada sekretaris desa mengenai kearsipan dan mengadakan rapat membahas program kerja kepala desa. Dengan adanya kegiatan tersebut maka akan bisa berjalan dengan baik pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Namun pada kenyataanya di desa banjar semina kegiatan tersebut tidak ada jadi bisa di bilang bahwa administrasi pemerintahan desa banjar semina masih kurang baik.

c. Mendamaikan perselisihan masyarakat

Adapun tanggapan responden mengenai tugas kepala dalam mendamaikan perselisihan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Desa dalam Mendamaikan Perselisihan Masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	19	20%
2	Cukup Baik	46	48%
3	Kurang Baik	30	32%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas menunjukkan, bahwa dari 95 responden mengenai tanggapan responden perselisihan masyarakat yang didamaikan oleh kepala desa, yang menyatakan baik sebanyak 19 orang atau 20%, yang

menyatakan cukup baik sebanyak 46 orang atau 48%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 30 orang atau 32%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa kinerja kepala desa dalam mendamaikan perselisihan masyarakat dalam kategori cukup baik.

Mendamaikan perselisihan masyarakat yaitu kepala desa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada atau terjadi di masyarakat di desa banjar seminai. Menurut pengetahuan penulis, Kepala desa sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintahan desa cukup mampu menyelesaikan semua masalah yang ada dalam masyarakat seperti mendamaikan perselisihan yang ada. Dan keadaan lapangan menunjukkan bahwa kepala desa mampu menyelesaikan perselisihan yang ada dalam masyarakat dan masalah-masalah tersebut tidak terlalu urgen (penting). Sehingga kepala desa dikatakan cukup baik dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Masalah-masalah yang di maksud disini seperti perselisihan antar pemuda di desa banjar seminai dan perselisihan antar rukun tetangga yang terjadi di desa banjar seminai.

- d. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

Adapun tanggapan responden mengenai pengembangan potensi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.8 Tanggapan Responden Tentang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	17	18%
2	Cukup Baik	41	43%
3	Kurang Baik	37	39%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden, mengenai tanggapan responden tentang pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan yang menyatakan baik sebanyak 17 orang atau 18%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 41 orang atau 43%, dan yang menyatakan kurang baik 37 orang atau 39%.

Dari tanggapan responden diatas dapat penulis simpulkan bahwa, usaha kepala desa dalam mengembangkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan berjalan cukup baik hal ini dapat di lihat dengan di bangunnya pembuatan parit desa banjar seminai yang bertujuan menjaga kestabilan lingkungan . kemudian dalam pengembangan sumber daya alam dapat diketahui dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu bentuk mata pencaharian bagi masyarakat di desa banjar seminai. Dengan demikian kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya dapat di katakana cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.9 Pengembangan SDA dan Pelestarian Lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	Perkebunan Kelapa Sawit	Berhasil
2	Pembuatan Parit Desa	Berhasil

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN

Adapun tanggapan responden mengenai prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.10 Tanggapan Responden Tentang Tata Pemerintahan desa yang Bersih dan Bebas dari KKN

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	13	14%
2	Cukup Baik	29	31%
3	Kurang Baik	53	56%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden, mengenai tanggapan responden tentang tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN. Yang menyatakan baik sebanyak 13 orang atau 14%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 29 orang atau 31%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 53 orang atau 56%.

Dari tanggapan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, usaha kepala desa dalam melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN masih kurang baik. Hal ini dapat di lihat dengan tidak adanya keterangan atau transparansi mengenai biaya yang di tampilkan dalam papan pengumuman mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina kecamatan dayun kabupaten siak. Papan pengumuman mengenai biaya dalam pelaksanaan administrasi ini berguna bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak menganggap bahwa aparat

pemerintahan desa melakukan KKN, dengan adanya transparasi yang jelas mengenai biaya maka tata pemerintahan desa itu dapat di katakana pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berfungsi untuk mengkoordinir kepala urusan yang ada dikantor desa, sekretaris desa juga berfungsi sebagai wakil dari kepala desa dalam melayani masyarakat.

Adapun tugas sekretaris desa yang merupakan sebagai sub indikator dalam menjalankan pemerintahan agar terwujudnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa antara lain:

- a. Memimpin, mengkoordinir, mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan.

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kinerja sekretaris desa dalam memimpin, mengkoordinir, mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan dapt dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.11 Tanggapan Responden Tentang Memimpin, Mengkoordinir, mengendalikan Serta Mengawasi Semua Unsur Kegiatan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	11	12%
2	Cukup Baik	39	41%
3	Kurang Baik	45	47%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden, mengenai tanggapan responden mengenai memimpin, mengkoordinir, mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan yang menyatakan baik sebanyak 11 orang atau 12%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 39 orang atau 41%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 45 orang atau 47%.

Tanggapan responden diatas yang dominan menyatakan kurang baik di dukung dengan tidak adanya data tentang kegiatan yang di koordinir sekretaris desa.

b. Merumuskan program kegiatan sekretaris desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai program kegiatan sekretaris desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.12 Tanggapan Responden Tentang Perumusan Program Kegiatan Sekretaris Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	13	14%
2	Cukup Baik	29	31%
3	Kurang Baik	53	55%
Jumlah		95	99%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa dari 95 responden, menyatakan tanggapan tentang perumusan program kegiatan kepada kepala desa yang menyatakn baik sebanyak 13 orang atau 14%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 29 orang atau 31%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 53 orang atau 55%. Hal ini dapat dinyatakan bahwa kinerja sekretaris desa sebagai perumus program

kegiatan dalam kategori kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat data pendukung pada tabel dibawah ini:

Tabel V.13 Perumusan Program Kegiatan Sekretaris Desa

No	Jenis Kegiatan	Kondisi
1.	Penyimpanan Arsip Desa	Tidak Baik
2.	Arsip Kependudukan	Tidak Baik
3.	Pembentukan Struktur Desa	Baik
4.	Disposisi Surat	Baik

Sumber: kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

Dari tabel di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya sebagai perumus program kerja belum terlaksana dengan baik, hal dapat di lihat dengan penyimpanan arsip desa dan arsip kependudukan kondisinya tidak baik, tetapi kegiatan sekretaris desa sebagai perumus kegiatan juga ada yang baik seperti pembentukan struktur desa dan pelaksanaan disposisi surat.

c. Melaksanakan unsur surat menyurat dan kearsipan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai unsur surat menyurat dan kearsipan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.14 Tanggapan Responden Tentang Surat Menyurat dan Kearsipan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	20	21%
2	Cukup Baik	16	17%
3	Kurang Baik	59	62%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden, tanggapan responden mengenai surat menyurat dan kearsipan yang

menyatakan baik sebanyak 20 orang atau 21%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 16 orang atau 17%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 59 orang atau 62%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan unsur surat-menyurat dan kearsipan di kategorikan kurang baik.

Berdasarkan tanggapan responden diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa tugas sekretaris desa dalam hal surat menyurat dan kearsipan di kantor desa banjar semilai belum terlaksana sepenuhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak lengkapnya pengisian tentang beberapa buku registrasi seperti buku data penduduk sementara, buku data keputusan desa dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan diatas dapat kita lihat pada data pendukung berikut ini:

Tabel V.15 Surat-menyurat dan Kearsipan di Kantor Kepala Desa Banjar Seminai

NO	Buku Registrasi	Desa Banjar Seminai	
		Lengkap	Tdk. Lengkap
1.	Buku Data Keputusan Desa	-	X
2.	Buku Inventaris Desa	X	-
3.	Buku Tanah Desa	-	X
4.	Buku Agenda	X	-
5.	Buku Expedisi	-	X
6.	Buku Data Induk Penduduk	X	-
7.	Buku Data Penduduk	-	X
8.	Buku Data Penduduk Sementara	-	X
9.	Buku Rencana Pembangunan	-	X
10.	Buku Kegiatan Pembangunan	-	X
11.	Buku Kader-Kader Pembangunan	-	X
12.	Buku Kas Umum	X	-
13.	Buku Anggaran Penyelenggaraan Rutin	X	-
14.	Buku Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	-	X
15.	Buku Inventaris Proyek	-	X
16.	Buku Data Peraturan Desa	-	X
17.	Buku Pembantu Kas Pengeluaran	-	X
18.	Buku Kas Pengeluaran Rutin	X	-
19.	Buku Kas Pembantu Penerimaan	-	X
20.	Buku Anggaran Penyelenggaraan Pembangunan	X	-
21.	Buku Aparat Pemerintahan Desa	X	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi dan pencatatan administrasi pemerintahan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pencatatan mutasi dan administrasi pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.16 Tanggapan Responden Tentang Mutasi dan Pencatatan Administrasi Pemerintahan desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	19%

2	Cukup Baik	14	15%
3	Kurang Baik	63	66%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden tentang mutasi dan pencatatan administrasi pemerintahan desa yang menyatakan baik sebanyak 18 orang atau 19%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 14 orang atau 15% dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 63 orang atau 66%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pencatatan mutasi dan pencatatan administrasi pemerintahan desa dikategorikan kurang baik. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat data pendukung pada tabel di bawah ini:

Tabel V.17 Mutasi Dan Pencatatan Administrasi Pemerintahan Desa

No	Data Potensi Desa	Lengkap	Tidak Lengkap
1.	Keterangan Umum Desa	x	-
2.	Kependudukan dan Tenaga Kerja	-	x
3.	Perumahan Dan Lingkungan Hidup	-	x
4.	Pendidikan Dan Kesehatan	-	x
5.	Sosial Dan Budaya	x	-
6.	Kependudukan	-	x
7.	Hiburan dan Olahraga	x	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Semina 2012

Dari tabel diatas penulis memberikan kesimpulan bahwa mutasi dan pencatatan administrasi pemerintahan desa tidak terlaksana sesuai yang di harapkan dan di dapat di katakana kurang baik, hal ini dapat di lihat dengan tidak lengkapnya data mengenai data potensi desa seperti data

kependudukan dan tenaga kerja, data perumahan dan lingkungan hidup, data pendidikan dan kesehatan serta data kependudukan.

3. Kepala Urusan pemerintahan

Kepala urusan umum merupakan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Adapun tugas kepala urusan pemerintahan yang merupakan sebagai sub indikator dalam menjalankan pemerintahan agar terwujudnya pelaksanaan administrasi pemerintahan desa antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan desa

Untuk dapat mengetahui tanggapan responden mengenai kegiatan administrasi kependudukan desa dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.18 Tanggapan Responden Tentang Administrasi Kependudukan Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	9	10%
2	Cukup Baik	17	18%
3	Kurang Baik	79	82%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden, tanggapan responden tentang administrasi kependudukan desa yang menyatakan baik sebanyak 9 orang atau 10%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 17 orang atau 18%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 79 orang atau 82%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan desa dikategorikan kurang baik.

Berdasarkan tanggapan responden diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja kepala urusan pemerintahan mengenai administrasi kependudukan desa masih kurang baik. Disini dapat di buktikan dengan tidak adanya data mengenai keadaan penduduk seperti registrasi penduduk perbulan, keadaan penduduk mengenai pasangan usia subur dan peserta KB, tentang penduduk liar yang tidak di akui oleh warga, dan keadaan penduduk mengenai bangunan rumah toko. Namun data administrasi kependudukan desa yang ada hanya mengenai jumlah penduduk, jumlah kelahiran dan jumlah kematian penduduk. Adapun data pendukungnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.19 Administrasi Kependudukan Desa Banjar Seminai Tahun 2011

No	Keadaan Penduduk	Jumlah
1.	Registrasi Penduduk Perbulan	-
2.	Kepindahan	3 orang
3.	Kelahiran	14 orang
4.	Kematian	1 orang
5.	Pasangan Usia Subur dan Peserta KB	-
6.	Penduduk Liar yang Tidak Diakui warga	-
7.	Bangunan Rumah Toko	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

b. Melaksanakan pencatatan monografi desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pencatatan monografi desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.20 Tanggapan Responden Tentang Pencatatan Monografi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	18	19%
2	Cukup Baik	42	44%
3	Kurang Baik	35	37%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden menyatakan tanggapan tentang pencatatan monografi desa, responden yang menyatakan baik sebanyak 18 orang atau 19%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 42 orang atau 44%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 35 orang atau 37%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pencatatan monografi desa di kategorikan Cukup Baik.

Berdasarkan tanggapan responden di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja kepala urusan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya mengenai pencatatan monografi desa di desa banjar seminaai cukup baik, hal ini dapat buktikan dengan lengkapnya tentang monografi desa seperti pengenalan tempat, keterangan petugas, keterangan aparat desa, kependudukan dan keterangan umum desa. Sebagai sumber data dan informasi bagi masyarakat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa banjar seminaai. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.21 Monografi Desa Banjar Seminaai Tahun 2012

No	Jenis Potensi Desa	Lengkap	Tidak Lengkap
----	--------------------	---------	---------------

1.	Pengenalan tempat	X	-
2.	Keterangan petugas	X	-
3.	Keterangan umum desa	X	-
4.	Kependudukan dan tenaga kerja	-	x
5.	Perumahan dan lingkungan hidup	-	x
6.	Pendidikan dan kesehatan	-	x
7.	Keterangan aparat desa	X	-

Sumber: Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

- c. Melaksanakan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dalam hal surat-menyurat

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemberian pelayanan terhadap masyarakat dalam hal surat-menyurat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.22 Tanggapan Responden Tentang Pelayanan masyarakat Dalam Hal Surat-Menyurat

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	5	5%
2	Cukup Baik	10	11%
3	Kurang Baik	80	84%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden menyatakan tanggapan tentang pelayanan masyarakat dalam hal surat-menyurat yang menyatakan baik sebanyak 5 orang atau 5%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 10 orang atau 11%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 80 orang atau 84%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal surat-menyurat di kategorikan Kurang Baik.

Berdasarkan tanggapan responden diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa kinerja kepala urusan pemerintahan dalam hal surat

menyurat dan pelayanan kepada masyarakat kurang baik. Menurut pengamatan penulis dilapangan, hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rekomendasi pembuatan KTP, KK, AKTE dan surat keterangan lainnya tidak dapat di selesaikan tepat pada waktunya.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu aparat pemerintahan desa tanggal 02 februari 2012 tentang pelayanan terhadap masyarakat dalam hal surat-menyurat, dapat di uraikan sebagai berikut:

“bahwa mengenai pelaksanaan pelayanan rekomendasi KK, KTP, AKTE maupun surat-menyurat lainnya yang akan diproses ketingkat atas (kecamatan) kami harus menunggu jumlah permintaan masyarakat lainnya hingga 5/6 orang. Sehingga kerjanya itu lebih efektif dan efisien apabila pekerjaan itu dilakukan sekaligus tanpa berulang-ulang”.

(Wawancara: 2012)

Namun berbeda dengan tanggapan masyarakat yang mengatakan bahwa kinerja aparat pemerintahan desa tidak cepat tanggap dalam melaksanakan tugasnya. Mereka menunggu berkas menumpuk terlalu lama hingga beberapa bulan misalnya dalam pembuatan AKTE yang harus menunggu waktu satu hingga tiga bulan. Sedangkan pada kenyataannya masyarakat menginginkan berkas tersebut segera diproses.

- d. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan dan keputusan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan penyelenggaraan buku administrasi peraturan dan keputusan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.23 Tanggapan Responden Tentang Penyelenggaraan Buku Administrasi Peraturan dan Keputusan Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	11	12%
2	Cukup Baik	12	13%
3	Kurang Baik	72	75%
Jumlah		95	99%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 95 responden, tanggapan responden tentang pelaksanaan penyelenggaraan buku administrasi peraturan dan keputusab desa yang menyatakan baik sebanyak 11 orang atau 12%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 12 orang atau 13%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 72 orang atau 75%.

Berdasarkan tanggapan nresponden di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa kinerja kepala urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan buku administrasi keputusan desa kurang baik. Hai ini di dukung dengan tidak adanya data mengenai buku keputusan desa dimana disini penyelenggaraan buku administrasi keputusan desa merupakan tugas dari kepala urusan pemerintahan.

- e. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.24 Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Administrasi Pertanahan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	7	8%
2	Cukup Baik	22	23%
3	Kurang Baik	66	69%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tanggapan responden mengenai kegiatan administrasi pertanahan yang menyatakan baik sebanyak 7 orang atau 8%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 22 orang atau 23%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 66 orang atau 69%.

Kepala urusan pemerintahan sebagai aparat pemerintahan desa di desa banjar seminai dalam menjalankan tugasnya mengenai kegiatan administrasi pertanahan masih kurang baik berdasarkan tanggapan responden di atas. Di katakana tidak baik karena tidak adanya data mengenai kegiatan administrasi pertanahan yang di selenggarakan oleh kepala urusan pemerintahan.

4. Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum merupakan pusat pelayanan administrasi, seluruh arsip-arsip, surat-surat, buku-buku agenda dan semua yang menyangkut tentang desa berpusat di kepala urusan umum.

Adapun kinerja kepala urusan umum dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina kecamatan dayun kabupaten siak sebagai berikut:

a. Melaksanakan tata kearsipan dan mengendalikan surat-surat

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai tata kearsipan dan mengendalikan surat-surat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.25 Tanggapan Responden Tentang Tata Kearsipan dan Surat-Surat

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	6	6%
2	Cukup Baik	13	14%
3	Kurang Baik	76	80%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tata kearsipan dan surat-surat yang menyatakan baik sebanyak 6 orang atau 6%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 13 orang atau 14%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 76 orang atau 80%.

Berdasarkan tanggapan responden di atas mengenai tugas kepala urusan umum dalam tata kearsipan dan surat-surat masih kurang baik. Sebagai kepala urusan umum yang merupakan pusat pelayanan administrasi seharusnya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tentang tata kearsipan dan surat-surat namun kenyataan di lapangan penulis tidak menemukan adanya data yang tersimpan dengan lengkap. Adapun sebagian data yang terisi dengan lengkap mengenai buku inventaris desa, buku agenda, data kas umum, data induk penduduk,

buku anggaran penyelenggaraan rutin, data anggaran pendapatan belanja desa, buku kas pengeluaran rutin dan data aparat pemerintahan desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.26 Kearsipan dan Pengendalian Surat-Surat

No	Buku dan Arsip Desa	Lengkap	Tidak Lengkap
1.	Data keputusan desa	-	X
2.	Data inventaris desa	X	-
3.	Buku tanah desa	-	X
4.	Buku agenda	X	-
5.	Buku ekspedisi	-	X
6.	Data induk penduduk	X	-
7.	Data penduduk	-	X
8.	Data penduduk sementara	-	X
9.	Buku rencana pembangunan	-	X
10.	Buku kegiatan pembangunan	-	X
11.	Buku kader-kader pembangunan	-	X
12.	Buku kas umum	X	-
13.	Buku anggaran penyelenggaraan rutin	X	-
14.	Data APBDesa	X	-
15.	Data inventaris proyek	-	X
16.	Data peraturan desa	-	X
17.	Buku pembantu kas pengeluaran	-	X
18.	Buku kas pengeluaran rutin	X	-
19.	Buku kas pembantu penerimaan	-	X
20.	Data aparat pemerintahan desa	X	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

- b. Melaksanakan pemeliharaan, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemeliharaan, pendistribusian dan menyimpan peralatan kantor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V. 27 Tanggapan Responden Tentang Pemeliharaan, Pendistribusian dan Penyimpanan Peralatan Kantor

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
----	---------	-----------	----------------

1	Baik	42	44%
2	Cukup Baik	20	21%
3	Kurang Baik	33	35%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pemeliharaan, pendistribusian dan penyimpanan peralatan kantor yang menyatakan baik sebanyak 42 orang atau 44%, yang menyatakan cukup baik 20 orang atau 21%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 33 orang atau 35%.

Berdasarkan tanggapan responden di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja kepala urusan umum dalam penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian peralatan kantor di desa banjar semina dinyatakan baik. Hal ini dapat di dukung dengan kondisi peralatan kantor yang merupakan sarana dalam melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa masih terjaga dengan baik, walaupun sarana tersebut masih kurang lengkap namun kepala urusan umum dapat mendistribusikan dan menyimpannya dengan sebaik mungkin. Adapun data pendukung dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.28 Keadaan Alat-Alat Kantor Desa Banjar Semina

No.	Jenis Alat-Alat Kantor	Unit	Kondisi
1.	Alat Komunikasi	-	-

2.	Computer	2	Kurang baik
3.	Mesin Tik	1	Baik
4.	Meja Kerja	11	Baik
5.	Kursi	7	Baik
6.	Ruang Kerja	3	Baik
7.	Lemari Arsip	2	Baik
8.	Papan Pengumuman	1	Baik
9.	Ruang Tunggu	1	Baik

Sumber : Kantor Kepala Desa Banjar Seminai 2012

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa Alat Komunikasi :
0 unit, Computer hanya 2 unit, Mesin Tik hanya 1 unit, Meja Kerja hanya 11 unit, Kursi hanya 7 unit, Ruang Kerja hanya 3 unit, Lemari Arsi hanya 2 unit, Papan Pengumuman hanya 1 unit, dan Ruang Tunggu hanya 1 unit.

c. Mencatat inventarisasi kekayaan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai inventarisasi kekayaan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.29 Tanggapan Responden Tentang Inventarisasi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	19	20%
2	Cukup Baik	40	42%
3	Kurang Baik	36	38%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai inventarisasi desa yang menyatakan baik sebanyak 19 orang atau 20%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 40 orang atau 42%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 36 orang atau 38%.

Berdasarkan tanggapan responden mengenai kinerja kepala urusan umum di desa banjar semina mengenai inventarisasi desa, penulis dapat menyimpulkan dapat di laksanakan cukup baik. Hal ini dapat di dukung dengan adanya mengenai fasilitas yang ada pada desa banjar semina seperti kendaraan dinas roda dua, tanah dan gedung kantor kepala desa dan peralatan kantor yang ada pada kantor kepala desa.

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengelolaan administrasi kepegawaian desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.30 Tanggapan Responden Mengenai Administrasi Kepegawaian Aparat Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	12	13%
2	Cukup Baik	16	17%
3	Kurang Baik	67	70%
Jumlah		95	99%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa yang menyatakan baik sebanyak 12 orang atau 13%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 16 oarang atau 17%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 67 orang atau 70%.

Dari tanggapan responden di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja kepala urusan umum mengenai administrasi kepegawaian aparat desa di desa banjar semina masih kurang baik. Hal

ini dapat di dukung dengan tidak adanya data mengenai administrasi kepegawaian aparat desa.

5. Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Adapun sub indikator dari kepala urusan pembangunan antara lain:

a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.31 Tanggapan Responden Tentang Administrasi Pembangunan Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	22	23%
2	Cukup Baik	11	12%
3	Kurang Baik	62	65%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kegiatan administrasi pembangunan desa yang menyatakan baik sebanyak 22 orang atau 23%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 11 orang atau 12%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 62 orang atau 65%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan desa dikategorikan kurang baik.

Menurut pengamatan penulis dilapangan administrasi pembangunan desa di desa banjar semina kurang berjalan dengan baik.

Aparat desa hanya berpatokan pada keadaan pembangunan yang sudah ada sebelumnya tanpa merencanakan pembangunan ke depan. Oleh sebab itu tidak adanya data yang mendukung mengenai pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan desa di desa banjar semina.

- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.32 Tanggapan Responden Tentang Pencatatan Hasil Swadaya Masyarakat

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	16	17%
2	Cukup Baik	18	19%
3	Kurang Baik	61	64%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa yang menyatakan baik sebanyak 16 orang atau 17%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 18 orang atau 19%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 61 orang atau 64%.

Berdasarkan tanggapan responden di atas penulis menyimpulkan bahwa kinerja kepala urusan pembangunan masih kurang baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya data tentang pencatatan hasil swadaya masyarakat yang dilakukan oleh kepala urusan pembangunan yang merupakan tugas dan kewajibannya. Namun menurut pengamatan

penulis dilapangan telah membantu pembangunan di desa banjar seminau seperti pembangunan masjid.

c. Daftar usulan kegiatan pembangunan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai daftar usulan kegiatan pembangunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.33 Tanggapan Responden Tentang Daftar Usulan Kegiatan Pembangunan

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	15	16%
2	Cukup Baik	23	24%
3	Kurang Baik	57	60%
Jumlah		95	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa daftar usulan kegiatan pembangunan yang menyatakan baik sebanyak 15 orang atau 16%, yang menyataka cukup baik sebanyak 23 orang atau 24%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 57 orang atau 60%.

Berdasarkan tanggapan responden di atas mengenai kinerja kepala urusan pembangunan tentang daftar ususan kegiatan pembangunan di desa banjar seminau masih kurang baik. Di katakana kurang baik karena tidak adanya data mengenai daftar usulan kegiatan pembangunan apa saja yang akan di realisasikan nantinya yang dapat di lihat oleh masyarakat sebagai data dan informasi yang jelas bagi masyarakat.

d. Menganalisa dan memelihara potensi desa

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pemeliharaan potensi desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.34 Tanggapan Responden Tentang Menganalisa dan Pemeliharaan potensi Desa

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	13	14%
2	Cukup Baik	17	18%
3	Kurang Baik	65	68%
Jumlah		95	100%

Sumber: hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa menganalisa dan memelihara potensi desa yang menyatakan baik sebanyak 13 orang atau 14%, yang menyatakan cukup baik sebanyak 17 orang atau 18%, dan yang menyatakan kurang baik sebanyak 65 orang atau 68%. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa kinerja kepala urusan pembangunan dalam menganalisa dan memelihara potensi desa dikategorikan kurang baik.

Berdasarkan tanggapan responden diatas penulis menyimpulkan bahwa aparat pemerintahan desa khususnya kepala urusan pembangunan kurang baik dalam melakukan analisa dan pemeliharaan potensi desa, hal ini di dukung dengan tidak adanya data yang penulis dapatkan di kantor desa. Namun menurut pengamatan dilapangan masyarakat di desa banjar seminai cukup baik dalam mengembangkan potensi desamengenai perkebunan kelapa sawit dan perkebunan lainnya yang menghasilkan salak pondoh.

5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Dalam Setiap Indikator Variabel

Adapun hasil dari rekapitulasi dari jawaban responden tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina kecamatan dayun kabupaten siak, dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi berikut ini:

1. Mengenai Kepala Desa

Tabel V.35 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Indikator	Jawaban 95 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat	18	23	54
2	Kemampuan menyelenggarakan administrasi desa	21	16	58
3	Mendamaikan perselisihan masyarakat	19	46	30
4	Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup	17	41	37
5	Melaksanakan prinsip pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN	13	29	53
Skor		88 (3)	155 (2)	232 (1)
Jumlah		264	310	232
Jumlah Skor		806		
Interval Skor		791,7-1.108,3 (Cukup Baik)		

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 5 indikator yang diteliti dari indikator Kepala Desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 264, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 310, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 232.

Berdasarkan penjumlahan daru 5 sub indikator diatas, maka dapat diketahui bahwa indikator kinerja kepala desa dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa banjar semina kecamatan dayun

kabupaten siak mendapat jumlah skor 806 dan dinyatakan dalam kategori “Cukup Baik”.

2. Mengenai Sekretaris Desa

Tabel V.36 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Sekretaris Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Indikator	Jawaban 95 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Memimpin dan mengkoordinir, mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan	11	45	39
2	Merumuskan program kegiatan kepada kepala desa	13	29	53
3	Melaksanakan unsur surat-menyurat dan kearsipan	20	16	59
4	Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi dan administrasi pemerintahan desa	18	14	63
Skor		62 (3)	104 (2)	215 (1)
Jumlah		186	208	215
Jumlah Skor		609		
Interval Skor		380-633,3 (Kurang Baik)		

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang di teliti dari indikator kinerja sekretaris desa, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 186, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 104, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 215.

Berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator di atas, maka dapat di ketahui bahwa indicator kinerja sekretaris desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semini kecamatan dayun kabupaten siak, mendapat jumlah skor 609 dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”

3. Kepala Urusan Pemerintahan

Tabel V.37 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Urusan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Indikator	Jawaban 95 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan desa	9	17	79
2	Melaksanakan pencatatan monografi desa	18	42	35
3	Melaksanakan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dalam hal surat-menyurat	5	10	80
4	Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan dan keputusan desa	11	12	72
5	Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan	7	22	66
Skor		50 (3)	103 (2)	332 (1)
Jumlah		150	206	332
Jumlah Skor		688		
Interval Skor		475-791,6 (Kurang Baik)		

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 5 sub indikator yang diteliti dari indikator kepala urusan pemerintahan, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 150, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 206, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 332.

Berdasarkan penjumlahan dari 5 sub indikator di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator kepala urusan pemerintahan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun

kabupaten siak mendapat jumlah skor 688 dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”.

4. Kepala Urusan Umum

Tabel V.38 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Urusan Umum Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Indikator	Jawaban 95 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Melaksanakan tata kearsipan dan mengendalikan surat-surat	6	13	76
2	Melaksanakan pemeliharaan, mendistribusikan dan menyimpan alat-alat tulis dan peralatan kantor	42	20	33
3	Mencatat inventarisasi kekayaan desa	19	40	36
4	Pengelolaan administrasi kepegawaian aparat desa	12	16	67
Skor		79 (3)	89 (2)	212 (1)
Jumlah		237	178	212
Jumlah Skor		627		
Interval Skor		380-633,3 (Kurang Baik)		

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator kepala urusan umum, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 237, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 178, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 212.

Berdasarkan penjumlahan dari 4 sub indikator di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator kinerja kepala urusan umum dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak mendapat jumlah skor 627 dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”.

5. Kepala Urusan Pembangunan

Tabel V.39 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Kinerja Kepala Urusan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Indikator	Jawaban 95 Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa	22	11	62
2	Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa	16	18	61
3	Daftar usulan kegiatan pembangunan	15	23	57
4	Menganalisa dan memelihara potensi desa	13	17	65
Skor		66 (3)	69 (2)	245 (1)
Jumlah		198	138	245
Jumlah Skor		581		
Interval Skor		380-633,3 (Kurang Baik)		

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 4 sub indikator yang diteliti dari indikator kepala urusan pembangunan, tanggapan responden yang menyatakan Baik berjumlah 198, kemudian yang menyatakan Cukup Baik berjumlah 138, dan yang menyatakan Kurang Baik berjumlah 245.

Berdasarkan dari penjumlahan dari 4 sub indikator di atas, maka dapat diketahui bahwa indikator kinerja kepala urusan pembangunan dari pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina kecamatan dayun kabupaten siak mendapat jumlah skor 581 dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”.

Kemudian untuk mengetahui secara keseluruhan hasil analisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak , dapat di lihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.40 Rekapitulasi Seluruh Indikator Variabel Penelitian Di Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

No	Sub Variabel	Jawaban Responden		
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik
1	Kepala Desa	264	310	232
2	Sekretaris Desa	186	208	215
3	Kepala Urusan Pemerintahan	150	206	332
4	Kepala Urusan Umum	237	178	212
5	Kepala Urusan Pembangunan	198	138	245
Skor		1035	1040	1236
Jumlah Skor : Jumlah Sub Variabel		3311 : 5		
Jumlah Skor Rata-rata		662,2		
Kategori		(Kurang Baik) 475-791,6		

Sumber: Hasil Penelitian 2012

Dari tabel di atas, dapat di jelaskan bahwa dari 5 indikator yang di teliti, tanggapan responden yang menyatakan Baik jumlah skornya adalah 1035, yang menyataka Cukup Baik jumlah skornya adalah 1040, dan yang menyatakan Kurang Baik jumlah Skornya adalah 1236.

Dengan demikian secara umum dapat di ketahui bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak mendapat skor rata-rata 662,2, dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”

5.4. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai

Dalam rangka meningkatkan program pemerintah, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai mendapat hambatan yaitu:

1. Sumber daya manusia yaitu kurangnya tingkat pendidikan atau kualitas dari aparat pemerintahan desa yang relatif rendah yang menyebabkan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa belum terlaksana dengan baik karena dengan pendidikan yang rendah membuat kurangnya pengetahuan dan skill yang dimiliki oleh aparat pemerintahan desa. Dalam memberikan pelayanan prima tentunya harus didukung perangkat-perangkat yang handal, baik secara kuantitas maupun kualitas. Namun pada kenyataannya terlihat bahwa tingkat pendidikan rata-rata perangkat aparat desa masih relatif rendah.
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki desa sebagai penunjang dalam proses administrasi yang membuat pelaksanaan administrasi pada desa banjar seminai kurang baik. Seperti computer nya ada tetapi kondisinya kurang baik jadi ketika di gunakan kadang-kadang tidak bisa karna rusak, kemudian adanya mesin diesel tetapi kadang-kadang rusak jadi ketika sedang menggunakan computer maka tidak bisa di lanjutkan lagi karna mesinya mati.
3. Keseluruhan dari pelaksanaan program pemerintah serta pembangunan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib. Namun disini dalam pelaksanaan administrasi dalam mensukseskan pembangunan di segala bidang. Khususnya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa untuk menunjang pembangunan desa, Camat

merupakan sebagai penggerak dari suatu kebijakan khususnya di bidang pembangunan di dalam mendukung keberhasilan pembangunan, Camat kurang memberikan bimbingan, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan di desa kepada masyarakat, sehingga sasaran dan laporan yang di peroleh belum tercapai pada tujuan yang telah ditentukan

Untuk dapat memberikan hasil yang optimal didalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan desa maka di perlukan kemampuan dan kemauan yang memadai baik dari segi kualitas maupun fasilitas yang mendukung, yang pada akhirnya memberikan pelayanan yang baik bagi kemajuan desa tersebut. Keberhasilan suatu pekerjaan sangat di pengaruhi oleh sistem kerja, mutu atau kualitas orang-orangnya serta sarana dan prasarana yang di perlukan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai analisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, maka dalam bab ini akan di tarik kesimpulan dan saran tentang penelitian yang sudah dilaksanakan, sehingga nantinya mampu dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang terkait.

1.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis dengan judul analisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, penulis mengambil kesimpulan bahwa administrasi merupakan sebagai suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dan atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Adapun pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina dapat di lihat menurut peraturan pemerintah No.72 tahun 2005 adalah mengenai tugas-tugas perangkat desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum dan kepala urusan pembangunan.

Dengan demikian secara umum dapat di ketahui bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar semina Kecamatan Dayun Kabupaten

siak dengan menggunakan teknik pengukuran skala likert terhadap masing-masing indikator mendapat skor rata-rata 622,2 dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka kiranya penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencapai pelaksanaan administrasi desa yang baik perlu adanya pendidikan dan pelatihan bagi perangkat desa dalam rangka mewujudkan desa yang otonom atau sesuai yang di harapkan ksususnya di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak.
2. Hambatan-hambatan yang di hadapai dapat diatasi dengan cara melakukan kerja sama yang baik antara aparat desa yang ada di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak.
3. Melakukan pembinaan bagi aparat desa dalam menjalankan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa banjar seminai kecamatan dayun kabupaten siak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1999, *Teori Pembangunan dan Psikologi Kepemimpinan Kerja*, Jakarta: Bharata
- Cokro Amijoyo, Bintaro, 2002, *Pemerintahan Desa*, Rajawali Pers
- Handayaniingrat, Soewarno, 2001, *Pengantar Ilmu Study Administrasi dan Menejemen*, Jakarta: Gunung Agung
- Wijaya, H.W, 2003, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kansil, C.S.T, 2001, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kusdi, 2009, *Teori Organisasi dan Administrasi*, Jakarta: Salemba
- Manullang, 1998, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, Jakarta: Yasa Guna
- Ndraha, Taliziduhu, 2003, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*, Bandung: Rineka Cipta
- Nurcholis, Hanif, 2011, *Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga
- Peraturan Pemerintah No.76 Tahun 2001
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Tugas-Tugas Perangkat Desa
- Saparin, Sumber, 1999, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pendidikan Desa*, Jakarta: Rajawali
- Siagian, S.P, 2003, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta:Gramedia
- Situmorang, M, 1994, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*, Jakarta: CV. Rajawali
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Administrsi*, Bandung: CV. Alfa Beta
- Supriady Bratakusumah, Deddy, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Syafiie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Administrasi Republik Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

Umar, Husin, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Widjaja, H.AW, 2002, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada